

**ANALISIS TERHADAP HUBUNGAN ANTAR INSTANSI
PEMERINTAH DALAM PENGAWASAN KEAMANAN
PANGAN DI PROVINSI KEPULAUAN
BANGKA BELITUNG**

SKRIPSI



Oleh:
RAE YASMIN FATENEH EKOPUTRI
NIM.401 12 11 079
Konsentrasi: Hukum Pidana

**JURUSAN ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG
BALUNIJUK
2016**

**ANALISIS TERHADAP HUBUNGAN ANTAR INSTANSI
PEMERINTAH DALAM PENGAWASAN KEAMANAN
PANGAN DI PROVINSI KEPULAUAN
BANGKA BELITUNG**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Memperoleh Gelar
Sarjana (S1) Pada Program Studi Ilmu Hukum – Fakultas Hukum
Universitas Bangka Belitung**



Oleh:
RAE YASMIN FATENEH EKOPUTRI
NIM.401 12 11 079
Konsentrasi: Hukum Pidana

**JURUSAN ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG
BALUNIJUK
2016**

HALAMAN PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Rae Yasmin Fateneh Ekoputri

N.I.M : 401 12 11 079

Program Studi : Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

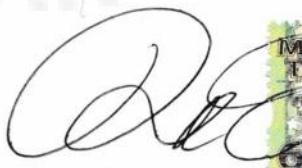
Judul Skripsi :

**“ANALISIS TERHADAP HUBUNGAN ANTAR INSTANSI
PEMERINTAH DALAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN DI
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG”**

Dengan ini menyatakan, bahwa hasil penulisan skripsi yang telah saya buat ini merupakan hasil karya sendiri dan benar keasliannya. Apabila ternyata di kemudian hari penulisan skripsi ini merupakan hasil dari plagiat atau penjiplakan terhadap karya orang lain, maka saya bersedia mempertanggungjawabkan sekaligus bersedia menerima sanksi berdasarkan aturan tata tertib Universitas Bangka Belitung.

Demikian pernyataan ini saya buat dalam keadaan sadar dan tidak dipaksakan oleh pihak manapun.

Yang Membuat Pernyataan



Rae Yasmin Fateneh E.

HALAMAN PERSETUJUAN

ANALISIS TERHADAP HUBUNGAN ANTAR INSTANSI PEMERINTAH DALAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN DI PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

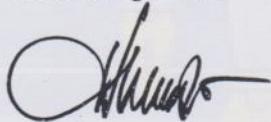
SKRIPSI

Oleh :

Rae Yasmin Fateneh Ekoputri
NIM. 401 12 11 079
Konsentrasi: Hukum Pidana

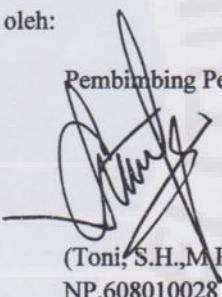
Telah disetujui oleh:

Pembimbing Utama



(Syamsul Hadi, S.H.,M.H.)
NP.606007014

Pembimbing Pendamping



(Toni, S.H.,M.H.)
NP.608010028

Mengetahui,

Ketua Program Studi Ilmu Hukum

Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung



(Sigit Nugroho S.H.,M.H.)
NIP. 198402102012121005

HALAMAN PENGESAHAN

ANALISIS TERHADAP HUBUNGAN ANTAR INSTANSI PEMERINTAH DALAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN DI PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

SKRIPSI

Oleh:
Rae Yasmin Fateneh Ekoputri
NIM. 401 12 11 079
Konsentrasi: Hukum Pidana

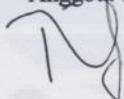
Telah Dipertahankan Di Depan Majelis Pengaji
Pada tanggal 3 Agustus 2016
Dan Dinyatakan LULUS

Majelis Pengaji
Ketua



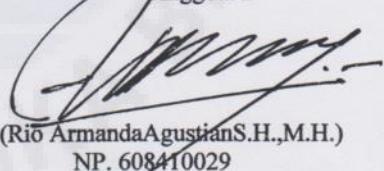
(Syamsul Hadi, S.H.,M.H.)
NP. 606007014

Anggota 1



(Dr. Dwi Haryadi, S.H.,M.H.)
NIP. 19830717201212004

Anggota 2



(Riö Armanda Agustian, S.H.,M.H.)
NP. 608410029

Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Bangka Belitung



(Syamsul Hadi, S.H.,M.H.)
NP. 606007014

HALAMAN PERSEMBAHAN DAN MOTTO

" MOTTO "

Pendidikan merupakan perlengkapan paling baik untuk hari tua.

(Aristoteles)

"PERSEMBAHAN"

Skripsi ini saya persembahkan untuk kedua orangtua tercinta, **Papaku Eko Arief Wibowo** dan **Mamaku Andi Yura Kustiaris** yang telah mendidikku menjadi pribadi yang kuat dan tegar. Terimakasih atas pengorbanan, nasihat serta dukungan yang tiada hentinya mengalir ke kehidupanku selama ini.....

Untuk kedua adikku tersayang **Refli Ariyudanto Ekoputra** dan **Rifra Cruz Ekoputra** yang selalu memberikan semangat dan selalu menunggu kepulanganku dari tanah rantau, serta Keluarga Besar yang telah memberikan segala dukungan.....

ABSTRAK

Rae Yasmin Fateneh Ekoputri

ANALISIS TERHADAP HUBUNGAN ANTAR INSTANSI PEMERINTAH DALAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN DI PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

Skripsi.FakultasHukum. 2016

Kata Kunci: Pangan, Keamanan Pangan, Hubungan Antar Instansi Pemerintah.

Pangan merupakan kebutuhan dasar yang sangat penting bagi kehidupan setiap insan baik secara fisiologis, psikologis, sosial, maupun antropologis. Keamanan Pangan menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan, adalah kondisi dan upaya yang diperlukan untuk mencegah pangan dari kemungkinan cemaran biologis, kimia, dan benda lain yang dapat mengganggu, merugikan, dan membahayakan kesehatan manusia serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat sehingga aman untuk dikonsumsi. Hubungan antar instansi pemerintah dalam pengawasan keamanan pangan seperti Badan Pengawas Obat dan Makanan, Badan Ketahanan Pangan, Dinas Kesehatan dan Kepolisian saling berkoordinasi dan melakukan penyidikan gabungan dalam upaya pengawasan keamanan pangan tetapi fakta dilapangan masih kurangnya sarana dan prasarana yang mengakibatkan terhambatnya proses pengawasan keamanan pangan seperti uji laboratorium yang masih terbatas. Tujuan penelitian dalam penulisan ini untuk mengetahui hubungan antar instansi pemerintah yang terkait dalam pengawasan keamanan pangan dan untuk mengetahui faktor penghambat serta faktor pendukung dalam pengawasan keamanan pangan. Permasalahan ini dikaji menggunakan metode penelitian yuridis empiris dan pendekatan sosiologi hukum. Hasil penelitiannya adalah beberapa instansi yang terkait memiliki faktor penghambat dan pendukung baik dari dalam instansi maupun luar instansi. Faktor penghambat internal yang meliputi kurangnya sarana dan prasarana seperti laboratorium sedangkan faktor eksternal adalah masih kurangnya kesadaran hukum masyarakat dalam memperhatikan keamanan pangan.

ABSTRACT

Rae Yasmin Fateneh Ekoputri

***LEGAL ANALYSIS OF RELATIONSHIP BETWEEN GOVERNMENT
UNDER SUPERVISION BASED ON FOOD SAFETY LAW NUMBER 18 OF
2012 CONCERNING FOOD
(STUDY OF PROVINCIAL JURISDICTION BANGKA BELITUNG)***

Essay. Faculty of Law. 2016

Keyword: Food, Food Security, the relationship between government agencies

Food is a basic need that is essential for the life of every human being either physiological, psychological, or anthropological. Food safety according to law number 18 of 2012 on food, is a condition and effort needed to prevent food from possible contamination of biological, chemical, and other substances that can disturb, harm, and endanger human health and does not conflict with religion, beliefs and culture so it is safe for consumption. The relationship between government agencies in food safety control such as the National Agency of Drug and Food, Food Security Agency, Department of Health and Police Coordinate and conduct spot checks combined in an effort to control food safety but the fact on field still a lack of facilities and infrastructure that result in delays in the process of food safety controls such as laboratory tests are still limited. The purpose of research in this paper to determine the relationship among government agencies involved in food safety controls and to determine the factors inhibiting and supporting factors in food safety controls. These issues were examined using empirical research methods juridical and normative juridical approach. Research result are some of the relevant agencies have an inhibiting factor and supporters from both inside and outside the institution. Internal inhibiting factors which include lack of infrastructure such as laboratories, while external factors is still a lack of awareness of the low in taking into account food safety.

KATA PENGANTAR

Dengan segala puji dan syukur atas kehadirat ALLAH SWT, karena berkat rahmat dan karunia-Nyalah sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini untuk memenuhi syarat guna mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung.

Skripsi yang berjudul **Analisis Terhadap Hubungan Antar Instansi Pemerintah Dalam Pengawasan Keamanan Pangan Di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung** dengan menyadari segala keterbatasan atas kemampuan dan ilmu yang dimiliki oleh penulis, jika di dalam penulisan skripsi ini pembaca menemukan kekurangan-kekurangan, baik itu dalam isi/materi ataupun susunan kalimat, untuk itu penulis mohon dimaklumi. Segala saran dan kritikan maupun masukan lainnya dari semua pihak untuk kebaikan penulisan skripsi ini akan penulis terima dengan senang hati demi perbaikan skripsi ini kearah yang lebih sempurna.

Selesainya skripsi ini merupakan hal utama yang menjadi tanggung jawab yang harus diselesaikan oleh penulis, sehingga bantuan banyak pihak merupakan hal yang sangat berarti dalam penyusunan skripsi ini, dan dengan segala kerendahan hati pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Dr. Ir. Muh. Yusuf, M.Si selaku Rektor Universitas Bangka Belitung.
2. Bapak Syamsul Hadi, S.H.,M.H.selaku Dekan Fakultas Hukum dan selaku Dosen Pembimbing Utama dalam penulisan skripsi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung.

3. Bapak Toni, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan Fakultas Hukum dan selaku Dosen Pembimbing Pendamping dalam penulisan skripsi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung.
4. Bapak Sigit Nugroho, S.H., M.H. selaku Ketua Program Studi Fakultas Hukum, Universitas Bangka Belitung.
5. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung beserta Staff Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung yang telah memberikan ilmu pengetahuan serta keterampilan pada penulis selama pendidikan di bangku kuliah.
6. Pihak Kepolisian Daerah, Balai Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), Badan Ketahanan Pangan (BKP) dan Dinas Kesehatan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang telah berkenan memberikan pengetahuan dan informasi seputar Pengawasan Keamanan Pangan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
7. Kedua Orangtuaku tercinta, Papa Eko Arief Wibowo dan Mama Andi Yura Kustiaris yang telah memberikan kasih sayang, perhatian, dan memberi kesempatan pada penulis untuk berjuang menuntut ilmu sehingga dapat menyelesaikan studi di perguruan tinggi ini.
8. Adik-adikku tersayang Refli Ariyudanto Ekoputra, Rifra Cruz Ekoputra, Andi Elbiana Dova, Andi Elvonia Dova, Andi Elshe Ridadova dan Keluarga Besar yang telah mendukunguntuk menyelesaikan skripsi ini.
9. Teman sekaligus sahabat, Sinarsih S.H, Annis Nurwasilah, Yeny Oktafia Amd. Sipil, Alina Rianty, Farida, Khairunnisa, Miranti Agustini, Devia

Herdita, Pipi Andriani, Devinovitasary, dan teman-teman Fakultas Hukum Angkatan 2012, teman-teman KKN Kurau Tahun 2015 serta teman-teman sekaligus sahabat-sahabatku di Kota Bekasi yang tidak bisa disebutkan satu-persatu.

10. Dan kepada semua pihak yang telah membantu dan memberikan dorongan dan doanya dalam penyusunan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih banyak kekurangan, karena setiap karya pasti memiliki kelebihan dan kekurangan. Semua kelebihan dan manfaat yang biasa diambil merupakan hasil dari bimbingan dan bantuan segenap pengajar serta semua kelemahan dalam karya ini merupakan akibat dari kurangnya pengalaman maupun pengetahuan penulis dalam pembuatan karya tulis. Oleh karenanya kritik dan saran sangat penulis harapkan guna menyempurnakan penulisan ini.

Akhir kata penulis mengucapkan banyak terimakasih dan semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi segenap pihak, terutama bagi sistem pendidikan di Indonesia.

Balunjuk, 30 Juni 2016

Penulis

Rae Yasmin Fateneh E.

DAFTAR ISI

Hlm.

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERNYATAAN	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN	v
ABSTRAK	vi
ABSTRACT	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR TABEL	xv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	4
D. Kerangka Teori.....	6
E. Metode Penelitian.....	9

BAB II KEAMANAN PANGAN DAN INSTANSI TERKAIT DALAM PENGAWASAN PANGAN

A. Keamanan Pangan.....	15
1. Pengertian Pangan.....	15
2. Pengertian Keamanan Pangan.....	17
3. Jenis dan Klasifikasi Pangan.....	18
4. Upaya Pengawasan dan Pengendalian Pangan	20
5. Sistematika Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan.....	23
B. Instansi Pemerintah Terkait dalam Pengawasan Pangan	24
1. Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM)	24
a. Pengertian Badan Pengawas Obat dan Makanan	24
b. Fungsi dan Wewenang Badan Pengawas Obat dan Makanan.....	25
c. Lingkup dalam Pengawasan Keamanan Pangan.....	27
2. Badan Ketahanan Pangan (BKP)	29
a. Pengertian Badan Ketahanan Pangan	29
b. Fungsi dan Wewenang Badan Ketahanan Pangan	29
c. Lingkup dalam Pengawasan Keamanan Pangan.....	30
3. Dinas Kesehatan.....	30
a. Pengertian Dinas Kesehatan.....	30
b. Tugas, Fungsi dan Wewenang Dinas Kesehatan	31
c. Lingkup dalam Pengawasan Keamanan Pangan.....	32

4. Kepolisian	33
a. Pengertian Kepolisian	33
b. Tugas, Fungsi dan Wewenang Kepolisian.....	35
c. Lingkup dalam Pengawasan Keamanan Pangan.....	39

**BAB III ANALISIS TERHADAP HUBUNGAN ANTAR INSTANSI
PEMERINTAH DALAM PENGAWASAN KEAMANAN
PANGAN DI PROVINSI KEPULAUAN BANGKA
BELITUNG**

A. Hubungan Antar Instansi Pemerintah dalam Pengawasan Keamanan Pangan Di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	42
B. Faktor Penghambat dan Pendukung yang Mempengaruhi Hubungan Antar Instansi Pemerintah dalam Melakukan Pengawasan Keamanan Pangan	58

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan	69
B. Saran.....	70

DAFTAR PUSTAKA 71

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

TABEL 3.1	46
------------------------	-----------